

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia tergolong sebagai negara berkembang memiliki tujuan, visi, dan misi untuk memajukan pembangunan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Berbagai tujuan tersebut muncul dari adanya berbagai masalah, salah satunya adalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan bagi negara ini (Nabila et al., 2023). Kemiskinan membuat banyak orang di suatu negara kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka dan seringkali mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara. Kemiskinan tidak hanya terkait aspek materi, tetapi juga kurangnya kesempatan dan dukungan dalam kehidupan. Akibatnya, kemiskinan memicu berbagai masalah lain yang saling berkaitan (Sukmaraga, 2011; Aziz & Husenudin, 2024)

Konsep kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu hanya mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan dasar sehari-hari. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Mereka yang dianggap miskin adalah individu yang tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya (Tokatlioglu et al., 2013). Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan global yang serius dan perlu diatasi di semua negara, baik maju maupun berkembang. Negara-negara di seluruh dunia berupaya untuk menciptakan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan yang semakin meluas (Çinar et al., 2022). Dukungan strategis dalam mengatasi kemiskinan melibatkan pentingnya data kemiskinan yang akurat untuk menghasilkan pengukuran yang dapat dipercaya. Data ini menjadi landasan untuk kebijakan yang fokus pada perbaikan kondisi masyarakat miskin, mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan, serta menetapkan target populasi yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Amalia, 2020).

Menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Sebanyak 13 juta penduduk saat ini beralih status menjadi golongan miskin. Penyebabnya dikarenakan Bank Dunia telah meningkatkan standar kemiskinan mereka jauh di atas standar sebelumnya. Menurut laporan Bank Dunia dalam “*East Asia and The Pacific Economic Update October 2022*” batas garis kemiskinan telah diubah. Perhitungan terbaru mengacu pada paritas daya beli (PPP) 2017. Akibatnya, Indonesia kini masuk dalam 100 besar negara miskin di dunia, sementara menurut *World Population Review* (WPR), Indonesia menempati peringkat ke-73 sebagai negara termiskin di dunia (Triono & Sangaji, 2023).

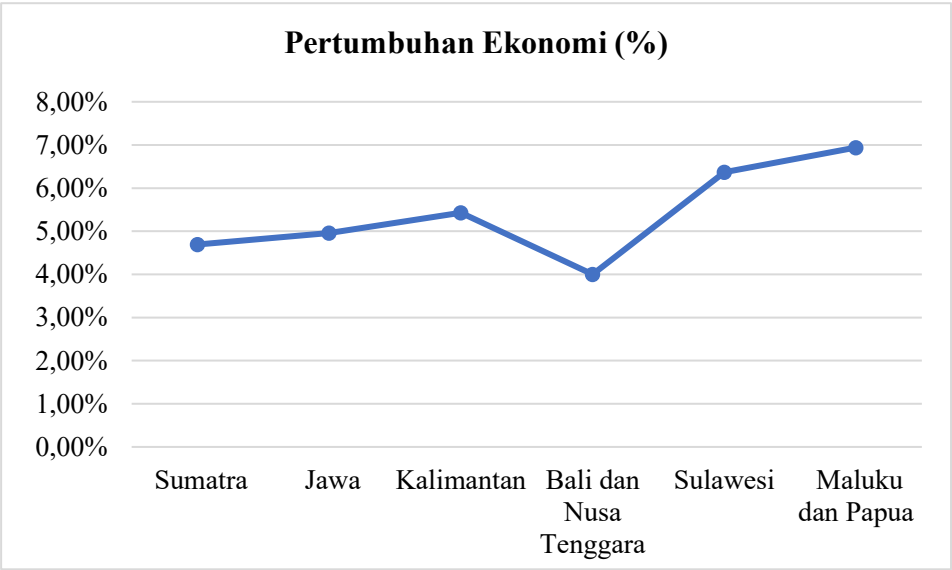


Sumber: GoodStats

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2023

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu tolok ukur penting dalam mengevaluasi kemajuan ekonomi suatu negara. Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, terjadi perubahan angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019-2023. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2021, mencapai puncaknya di tahun 2021 dengan jumlah 27,54 juta jiwa. Namun, kemudian terjadi penurunan secara bertahap hingga mencapai 25,9 juta jiwa pada tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi yang saling terkait. Penguatan aktivitas perekonomian, penurunan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi merupakan faktor utama yang

berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako telah diluncurkan untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan. Bantuan tambahan berupa pangan beras juga disediakan guna menjaga akses pangan dan stabilitas harga, dengan tujuan memastikan kebutuhan dasar rumah tangga miskin tetap terpenuhi. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan ke level sebelum pandemi dengan lebih cepat. Dengan target kemiskinan sebesar 6,5-7,5% pada tahun 2024, pemerintah telah merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Willy, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per Pulau Tahun 2023

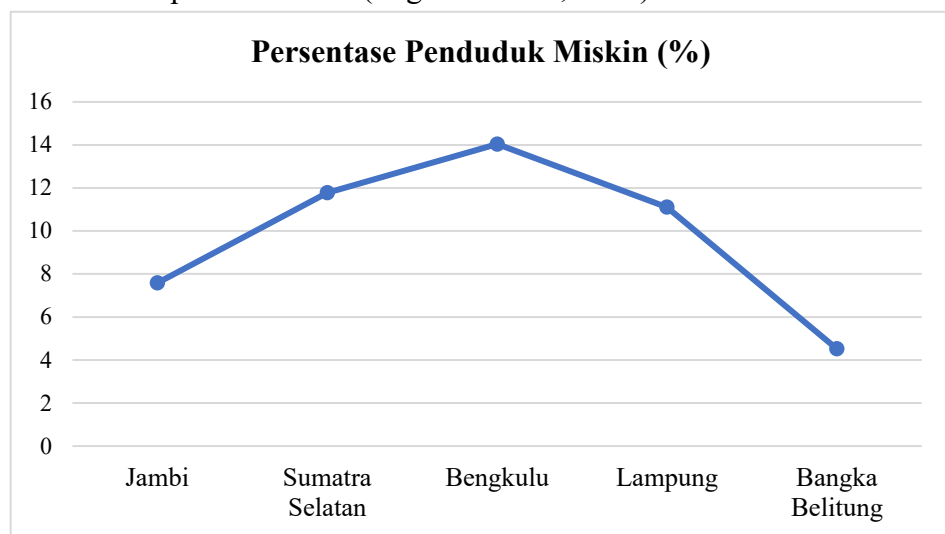
Pada tahun 2023, kinerja pertumbuhan ekonomi di semua kelompok pulau menunjukkan kondisi yang stabil meskipun terdapat ancaman pelemahan ekonomi global. Secara keseluruhan, pertumbuhan tertinggi terjadi di kelompok Pulau Maluku dan Papua dengan pertumbuhan mencapai 6,94 persen; diikuti oleh Pulau Sulawesi dengan 6,37 persen; Pulau Kalimantan dengan 5,43 persen; Pulau Jawa dengan 4,96 persen; dan Pulau Sumatra dengan 4,69 persen.

Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 4,00 persen (c-to-c). Pulau Sumatra, meskipun menjadi salah satu pulau terbesar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung rendah dibandingkan dengan pulau lainnya, yakni sebesar 4,69 persen (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pulau Sumatra sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dengan terdiri dari 10 provinsi, Sumatra menjadi pulau dengan jumlah provinsi terbanyak. Setiap provinsi memiliki perbedaan kondisi geografis dan sumber daya yang berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah. Variasi dalam potensi sumber daya dan geografis menjadi penyebab utama ketimpangan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan perbedaan kemampuan setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang pada akhirnya menciptakan disparitas antara daerah yang maju dan tertinggal. Disparitas ini juga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Ketidakseimbangan dalam pembangunan antar daerah juga erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan oleh pemerintah daerah (Mardhian et al., 2023; Nurhemi & R, 2015).

Pulau Sumatra terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sumatra bagian utara dan Sumatra bagian selatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 Pasal 2, Sumatra bagian selatan merujuk pada area yang mencakup Provinsi Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, serta Bangka Belitung. Wilayah ini mengalami fluktuasi dalam tingkat kemiskinan (Ariza, 2024).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa Pulau Sumatra memiliki 5 juta lebih penduduk miskin dan menjadikannya pulau termiskin kedua setelah Pulau Jawa. Tiga provinsi diantaranya yaitu Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung masuk ke dalam kategori 15 provinsi termiskin di Indonesia. Bengkulu dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,34% yang kemudian diikuti oleh Sumatra Selatan 11,95%, dan Lampung 11,44%. Besarnya kemiskinan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran dalam perekonomian (Sugiharti et al., 2022).

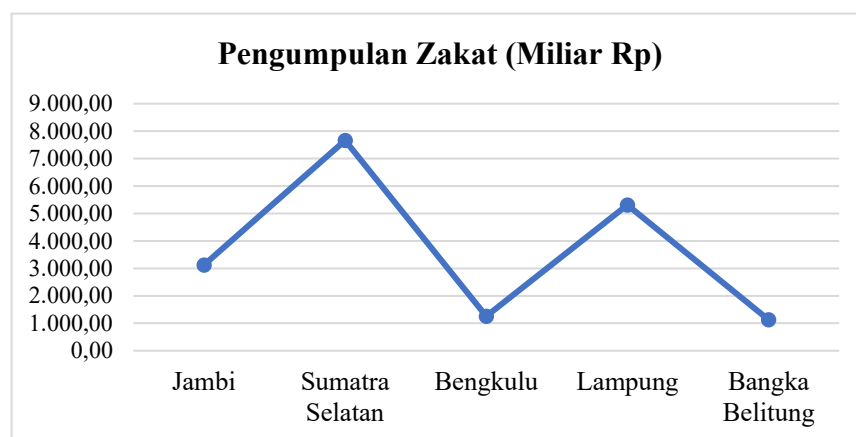


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 3 Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatra Bagian Selatan 2023

Gambar 1.3 menunjukkan grafik perbandingan persentase penduduk miskin di wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan yang mencakup Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki nilai persentase penduduk miskin tertinggi dengan angka mencapai 14,04%, yang selanjutnya diikuti oleh Provinsi Sumatra Selatan dengan nilai 11,78%, dan Lampung sebesar 11,11%. Selanjutnya Provinsi Jambi dengan nilai 7,58% dan Bangka Belitung menempati posisi terendah dengan nilai 4,52%.

Memerangi kemiskinan merupakan prioritas dalam pembangunan nasional Indonesia, hal ini dikarenakan kemiskinan juga mengancam kesejahteraan manusia dengan merusak akidah, akhlak, pikiran, dan keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi komprehensif termasuk kebijakan fiskal berupa zakat (Suryani et al., 2022; Qardhawi, 2005). Zakat merupakan instrument keuangan fundamental dalam Islam yang sudah diterapkan sejak awal peradabannya. Praktik zakat tidak hanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis (Zarkasih et al., 2023). Dalam ekonomi Islam, zakat berperan penting dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai pemerataan kekayaan dan membantu individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mengurangi ketimpangan sosial (Nurhakim et al., 2024; Sundari, 2018).



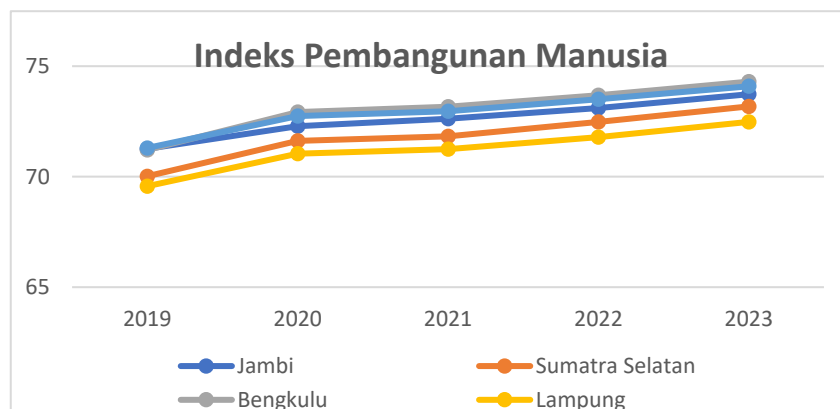
Sumber: BAZNAS

Gambar 1. 4 Dimensi Pengumpulan Zakat Wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan

Gambar 1.4 menunjukkan dimensi pengumpulan zakat di wilayah Sumatra Bagian Selatan. Provinsi Sumatra Selatan menempati posisi pertama dengan angka tertinggi yaitu 7.662,60, kemudian diikuti oleh Provinsi Lampung dengan nilai 5.312,53 yang juga menunjukkan kontribusi zakat yang cukup

tinggi. Selanjutnya Provinsi Jambi mencatatkan angka 3.119,49, sementara Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung memiliki nilai yang cukup rendah yaitu 1.257,75 dan 1.127,77. Data ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam potensi pengumpulan zakat di wilayah Sumatra, di mana beberapa provinsi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pengelolaan zakat (Noor et al., 2022).

Selain zakat, salah satu indikator penting lainnya dalam mengukur kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup yang mencakup kemampuan untuk hidup lebih sehat, memiliki akses pendidikan yang lebih baik, dan mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi (Eren & Kaynak, 2017; Hasbi, 2023a). Pada tahun 1990, *United Nations Development Program* (UNDP) memperkenalkan konsep baru untuk mengukur kemajuan suatu negara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur kualitas hidup suatu masyarakat dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: harapan hidup sehat, tingkat pendidikan, dan pendapatan (Hasan et al., 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang menggambarkan kesejahteraan penduduk suatu negara berdasarkan tiga aspek kunci diantaranya rata-rata atau umur panjang, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak. IPM menunjukkan bagaimana pembangunan manusia berdampak pada kualitas hidup setiap individu (Rahim et al., 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan

Gambar 1.5 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatra Bagian Selatan dari tahun 2019-2023. Grafik ini menunjukkan adanya tren IPM di seluruh daerah yang dianalisis selama periode tersebut. IPM tertinggi tahun 2023 berada di Provinsi Bengkulu yaitu dengan nilai 74,3. Sedangkan IPM terendah pada tahun 2023 berada di Provinsi Lampung dengan nilai 72,48. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Sumatra Bagian Selatan, meskipun masih terdapat perbedaan antara masing-masing daerah.

Menurut Hakim et al. (2020) meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah banyak digunakan, konsep ini hanya berfokus pada aspek material kesejahteraan dan mengabaikan aspek spiritual. Hal ini membuat IPM tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang pembangunan manusia. Kritik terhadap IPM dari segi teori dan penerapannya pun muncul. Sebagai solusi, Indeks Pembangunan Manusia Islam (IPM) atau *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dikembangkan. Konsep ini menawarkan pendekatan alternatif yang mengukur kesejahteraan manusia secara komprehensif, termasuk aspek di dunia dan akhirat (Yumashev et al., 2020).

Konsep pembangunan manusia dalam perspektif Islam tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan oleh *Human Development Index* (HDI), karena indikator-indikatornya bersifat umum dan belum mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, muncul *Islamic Human Development Index* (IHDI) yang diperkenalkan oleh Anto sebagai instrumen yang dirancang untuk mengukur pembangunan manusia berdasarkan *maqashid syariah*. Meskipun *Human Development Index* (HDI) telah digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, instrumen ini belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka pembangunan dalam perspektif Islam. Hal ini disebabkan oleh konsep dan indikator yang digunakan masih bersifat umum dan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Oleh karena itu,

penggunaan *Islamic Human Development Index* (IHDI) dianggap lebih tepat di negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. *Islamic Human Development Index* (IHDI) dirancang berdasarkan perspektif Islam dalam konsep dan teorinya, sehingga mampu merefleksikan pembangunan manusia yang sesuai dengan tujuan syariah (Syofyan et al., 2024).

I-HDI merupakan konsep baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang didasarkan pada teori *maqashid syariah* yang dicetuskan oleh Imam Syatibi yang kemudian diadaptasi ke dalam teori ekonomi pembangunan Islam oleh Ibnu Khaldun dan Umer Chapra. Dalam teori ini, pusat analisis pembangunan adalah kesejahteraan manusia dengan fokus pada perlindungan terhadap lima aspek *maqashid syariah* yaitu dimensi agama (*ad-din*), dimensi akal (*al-aql*), dimensi jiwa (*an-nafs*), dimensi keturunan (*an-nasl*) dan dimensi kekayaan (*al-maal*) (Fadia et al., 2024). Kelima aspek ini merupakan kebutuhan fundamental manusia. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi atau terpenuhi secara tidak proporsional, maka kesejahteraan hidup tidak akan mencapai taraf yang optimal (Hasby et al., 2021). Dari sudut pandang Islam, indeks ini dapat digunakan untuk mengukur kemajuan di bidang pembangunan manusia. Pengukuran kualitas sumber daya manusia menurut perspektif Islam tidak hanya dilihat dari tiga aspek saja, tetapi lebih mendalam yang meliputi aspek material dan aspek non-material (Hasbi, 2023a).

Islamic Human Development Index (I-HDI) dirancang untuk lebih mencerminkan realitas sosial-ekonomi masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam indikator pembangunan. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis I-HDI dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan Abdullah et al., (2025) menunjukkan bahwa I-HDI memiliki korelasi negatif yang lebih kuat dengan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, peningkatan I-HDI lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, menjadikannya ukuran yang lebih relevan dalam memahami hubungan antara pembangunan manusia dan kesejahteraan ekonomi. Temuan ini semakin

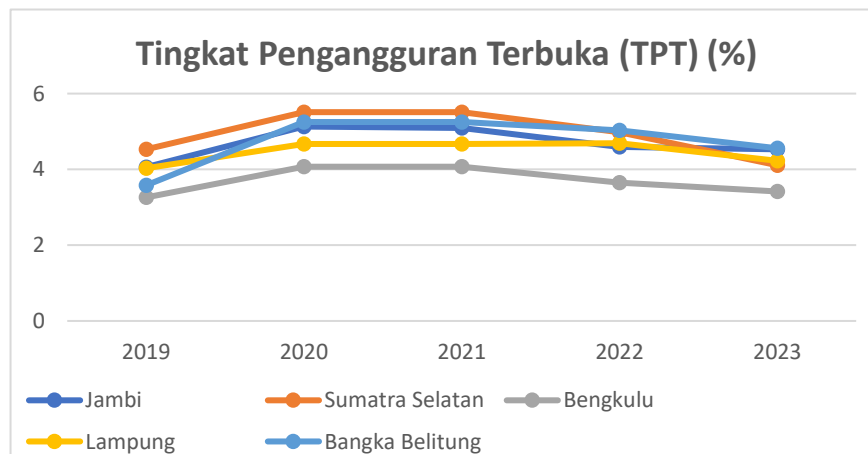
diperkuat melalui analisis kausalitas Granger yang mengungkapkan adanya hubungan dinamis dua arah antara I-HDI dan kemiskinan. Dengan kata lain, selain pembangunan manusia yang memengaruhi tingkat kemiskinan, perubahan dalam tingkat kemiskinan juga berdampak terhadap perkembangan I-HDI. Implikasi dari studi ini sangat signifikan bagi para pembuat kebijakan. Dengan memperhatikan I-HDI, strategi pengentasan kemiskinan dapat dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, meskipun penelitian ini berfokus pada daerah Yogyakarta, konsep I-HDI memiliki potensi untuk diterapkan di berbagai daerah mayoritas Muslim lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali et al., (2024) menunjukkan bahwa *Islamic Human Development Index* (I-HDI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatra Utara tahun 2018-2023. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hayatuzzahrah et al., (2024) menunjukkan bahwa I-HDI memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al., (2025) menunjukkan bahwa I-HDI secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Faizi et al., (2024) menunjukkan bahwa *Islamic Human Development Index* (I-HDI) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hasbi, (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal kesehatan, dan zakat memiliki pengaruh positif terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

Selanjutnya, faktor lain yang menjadi indikator dalam memengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Tingkat pengangguran dapat menjadi indikator untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara atau daerah. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka dapat mengindikasikan bahwa perekonomian mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran. Sebaliknya, apabila

tingkat pengangguran rendah, maka dapat mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami pertumbuhan. Di samping itu, tingkat pengangguran juga dapat mencerminkan adanya disparitas atau ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di suatu negara atau wilayah tertentu. Fenomena pengangguran dapat muncul sebagai akibat dari peningkatan dalam jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, serta rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Situasi ini terjadi akibat lambatnya laju penciptaan kesempatan kerja baru yang mampu mengakomodasi para pencari kerja yang siap memasuki dunia kerja (Imanto et al., 2020).

Salah satu pulau yang mengalami penurunan ekonomi dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi adalah Pulau Sumatra. Pulau Sumatra menghadapi tantangan ekonomi yang serius ditandai dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pulau ini mengalami kontraksi sebesar -1,19% dan secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi selama periode 2016-2020 berada di bawah rata-rata nasional. Tingkat pengangguran di Pulau Sumatra tergolong tinggi dengan rata-rata 5,38% antara 2016-2020, angka ini hampir sebanding dengan rata-rata tingkat pengangguran nasional yang mencapai 5,74%. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di pulau tersebut mencapai 6,14 persen. Data ini menunjukkan bahwa Pulau Sumatra mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan masih menghadapi tantangan dalam hal pengangguran (Alrakhman et al., 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan

Gambar 1.6 menunjukkan grafik tingkat pengangguran terbuka di wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan dari tahun 2019-2023. Secara umum, terdapat penurunan tingkat pengangguran terbuka di beberapa wilayah selama periode tersebut. Pada tahun 2019, Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi yaitu dengan nilai 4,53%. Provinsi dengan tingkat pengangguran terendah pada tahun 2019 yaitu Bengkulu dengan nilai 3,26%. Pada tahun 2023, Bengkulu menempati posisi terendah dengan tingkat pengangguran sebesar 3,42%, sementara Bangka Belitung menempati posisi tertinggi dengan tingkat pengangguran sebesar 4,56%. Jika dilihat secara keseluruhan, tahun 2023 menunjukkan kemajuan dalam pengurangan tingkat pengangguran terbuka di wilayah ini. Namun, beberapa daerah masih diperlukan penanganan lebih lanjut untuk menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Marpaung et al., (2023) yang menyimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Sumatra Utara berpengaruh negatif. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Hafiz et al., (2024) yang berpendapat bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisnatallya et al., (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kota-kota Provinsi Jawa Barat.

Darma et al., (2024) dalam penelitiannya mengatakan bahwa zakat mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Mereka menyatakan bahwa semakin banyak zakat yang disalurkan, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al., (2024) yang menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Zakat, *Islamic Human Development Index* (I-HDI), dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatra Bagian Selatan” dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana variabel-variabel tersebut memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan periode 2019-2023.

1.2 Masalah Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika perkembangan Indeks Zakat, *Islamic Human Development Index* (IHDI), Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan di wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Zakat, *Islamic Human Development Index* (IHDI), dan Tingkat Pengangguran baik secara parsial maupun simultan terhadap Kemiskinan di wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika perkembangan Indeks Zakat, *Islamic Human Development Index* (I-HDI), dan Tingkat Pengangguran

terhadap Kemiskinan di wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan periode 2019-2023.

2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Zakat, *Islamic Human Development Index* (I-HDI), dan Tingkat Pengangguran secara parsial maupun simultan terhadap Kemiskinan di wilayah Sumatra Bagian Selatan periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian atau sumber informasi yang lebih mendalam bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mempelajari topik terkait pengaruh Indeks Zakat, I-HDI, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi untuk mengambil kebijakan dalam upaya penyelesaian permasalahan perekonomian khususnya di wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan.